

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi nomor 4 di dunia. Kementerian dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merilis data penduduk Indonesia per 30 Juni tahun 2021 adalah sebanyak 272.229.372 jiwa dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Dengan padatnya penduduk Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan muncul, salah satu permasalahan terbesar di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan menjadi perbincangan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multi sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementerian atau lembaga maupun individu masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan maupun papan (Badan Pusat Statistik, 2021). Pendapatan yang rendah ini juga berdampak pada kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Orang yang dikategorikan miskin yaitu orang yang jumlah pengeluarannya per bula

dibawah dari 1.600.000 untuk memenuhi kebutuhan dasar jika pengeluarannya di atas dari 1.600.000 per bula maka tidak dikategorikan orang miskin.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus – menerus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat relevan untuk dibahas secara berkelanjutan. Hal ini bukan karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, namun saat ini masalah kemiskinan semakin meningkat drastis di Negara Indonesia (Suharto, 2006).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang miskin adalah 27,54 juta terhitung Maret tahun 2021. Jumlah ini menjadikan tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Namun jika disbanding dengan Maret tahun 2020 jumlah penduduk miskin 0,36 persen atau naik sebanyak 1,12 juta orang. Pada Maret tahun 2020 penduduk miskin berjumlah 26,42 juta.

Program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan guna untuk menekankan angka kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdapat pasal 1 ayat 1 “penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,

terencana dan bersinergi, dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah kemiskinan maka pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan sosial salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat atau keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (UU NO.1 Tahun 2018). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis. Adanya PKH diharapkan keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan

sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

PKH diluncurkan pada tahun 2007 di 7 provinsi di Indonesia. Sekarang PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan (Buku pedoman pelaksanaan PKH, 2021). Perkembangan jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021)

Gambar 1.1

Cakupan PKH Di Indonesia Tahun 2007-2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi *budget* PKH, melampaui *baseline* target perencanaan

2. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 5.981.528 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 7,6 Triliun
3. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,3 Triliun
4. Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
5. Jumlah penerima PKH tahun 2019 sebanyak 9.841.270 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,7 Triliun
6. Jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun

Selain dari Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan sosial yang lainnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program transformasi dari program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Penerima manfaat BPNT ini adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Besaran manfaat ini adalah Rp 110.000 per bulan, namun bantuan ini tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur sesuai kebutuhan KPM (Kementrian Sosial Republik Indonesia , 2019).

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbesar kedua setelah kota

padang di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 20.344 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mengurangi kemiskinan dengan program-program yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Masalah kemiskinan mendesak pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk segera melakukan langkah – langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Kecamatan Akabiluru merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki jumlah penduduk 28.558 jiwa menurut BPS Lima Puluh Kota tahun 2020. Kecamatan Akabiluru merupakan daerah penerima program bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan tertinggi kedua setelah Kecamatan Lareh Sago Halaban. Berikut ini jumlah data Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Akabiluru:

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Bantuan Sosial Di Kecamatan Akabiluru

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah KK
BPNT	1.739 KK
PKH	2.014 KK
JUMLAH	3.753 KK

Sumber : Kementrian Sosial RI Dan Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota (Diolah)

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 2.014 KK sedangkan penerima

Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.739 KK. Dilansir dari wawancara langsung dengan Koordinator PKH Kabupaten Lima Puluh Kota Menyatakan bahwa “ anggaran terbesar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk di dalamnya Kecamatan Akabiluru adalah untuk program keluarga harapan bahkan anggarannya lebih besar dibandingkan dengan program rehap rumah dengan anggaran 17,5 juta per rumah masyarakat miskin.

Meskipun PKH dan BPNT dinilai sebagai program perlindungan sosial paling efektif namun berdasarkan beberapa penelitian tentang PKH dan BPNT ditemukan fakta bahwa pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan yang seharusnya (Nuraida, 2019). Bantuan tunai yang diterima digunakan untuk memenuhi atau membeli barang konsumtif seperti untuk membeli pakaian sehari-hari, rokok dan barang konsumtif lainnya. Banyak masyarakat yang merasa bahwa bantuan tunai PKH dan BPNT ini tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, padahal tujuan diberikannya bantuan ini diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan juga untuk makan sehari – hari. Masyarakat cenderung merasa terlalu bergantung kepada bantuan – bantuan sosial yang diberikan. Adanya bantuan sosial tidak memberikan dampak yang baik untuk kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan KPM. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pemberian sebelum dan sesudah adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Akabiluru?
2. Bagaimana dampak pemberian sebelum dan sesudah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Akabiluru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemberian sebelum dan sesudah adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Akabiluru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemberian sebelum dan sesudah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Akabiluru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Penulisan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan serta memperluas pemikiran penulis dan juga bisa dijadikan media aplikasi serta penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan .

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas khususnya untuk program studi Ilmu Ekonomi.

3. Manfaat bagi penelitian berikutnya.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti di bidang yang sama.

4. Manfaat bagi jurusan Ilmu Ekonomi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembuatan skripsi khususnya di jurusan ilmu ekonomi.

5. Manfaat bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai program bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai yang diberikan pemerintah.

6. Manfaat bagi pemerintah

Memberikan informasi bagi pemerintah tentang pelaksanaan PKH dan BPNT serta menjadi evaluasi dan bahan kajian untuk program selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data memudahkan untuk menganalisisnya dan memberikan batasan-batasan masalahnya. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengalokasian Bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari perubahan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah menerima BPNT dan PKH. Batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen (Y) yang diteliti adalah Kesejahteraan Masyarakat
2. Variabel independen (X) yang diteliti adalah :
X1= BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
X2 = PKH (Program Keluarga Harapan)
3. Penelitian ini mempunyai rentang waktu yang belum di tentukan dengan menggunakan data Primer dan data sekunder di Kecamatan Akabiluru.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan mempermudah penyusunan serta pemahaman mengenai skripsi yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah dan ruang lingkup yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan dari penelitian. Dari tujuan penelitian diperoleh manfaat penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan teori mengenai konsep dan penelitian terdahulu yang terkait yang kemudian dijadikan landasan dalam melakukan penelitian dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka didapat kerangka pemikiran konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan variabel mengenai variabel penelitian yang digunakan dan defenisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian serta metode analisis yang digunakan untuk penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PERKEMBANGAN VARIABEL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan kondisi umum kecamatan akabiluru serta perkembangan variabel penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai temuan empiris, pembahasan serta implikasi kebijakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk penelitian tersebut.

